

Integrasi Sosial Masyarakat Golongan Miskin Di Perkotaan

Raras Kusuma

Afiliasi: Universitas Negeri Surabaya

E-mail: raraskusuma71@gmail.com

Abstract

The poor are seen as incapable and helpless people because poverty has become a culture for them. This situation is caused by structural constraints that are still shackled in the community. In the process of survival in society, each group is required to establish and develop social relationships based on the complexity of the interests of each group in order to create social integration. The condition of the poor living in urban areas is at the subsistence level and below subsistence. So that this triggers pressure that causes the poor to be in a disadvantaged position. In an effort to uphold justice to create a form of social integration in urban areas, an interconnected environment is needed. In the reality that is found, the life of the community between groups in urban areas has not yet occurred as a perfect assimilation. Imperfect assimilation results in problems that trigger inter-group conflicts, such as discrimination by various parties or groups against the poor who are powerless. This article discusses how the poor can be integrated with various aspects of life and urban groups in the existing reality.

Keywords: *Proverty; The Poor; Social Integration;*

Abstrak

Golongan miskin dipandang sebagai orang yang tidak mampu dan tidak berdaya dikarenakan kemiskinan telah menjadi budaya bagi mereka. Keadaan tersebut disebabkan karena adanya kendala struktural yang masih membelenggu di kalangan masyarakat. Dalam proses keberlangsungan hidup di dalam masyarakat, setiap golongan diharuskan menjalin serta mengembangkan hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh kompleksitas kepentingan masing-masing golongan agar tercipta integrasi sosial. Kondisi masyarakat golongan miskin yang hidup di perkotaan berada pada tingkat subsistens serta di bawah subsistens. Sehingga hal tersebut memicu tekanan yang menimbulkan golongan miskin berada pada posisi yang dirugikan. Dalam upaya menegakkan keadilan untuk menciptakan suatu bentuk integrasi sosial di perkotaan diperlukan lingkungan yang saling berhubungan. Pada realita yang ditemukan, kehidupan masyarakat antar golongan di perkotaan belum terjadi pembauran yang sempurna. Pembauran yang belum sempurna mengakibatkan permasalahan yang memicu konflik antar golongan, seperti adanya diskriminasi yang dilakukan oleh berbagai pihak atau golongan kepada masyarakat miskin yang tidak berdaya. Dalam artikel ini membahas mengenai bagaimana masyarakat miskin dapat terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan dan golongan diperkotaan dalam realita yang ada.

Kata Kunci: Kemiskinan; Golongan Miskin; Integrasi Sosial

PENDAHULUAN

Pada dekade terakhir ini, kemiskinan menjadi topik yang dibahas dan diperdebatkan di berbagai forum nasional maupun internasional, walaupun kemiskinan itu sendiri telah muncul ratusan tahun yang lalu. Fakta menunjukkan pembangunan yang telah dilakukan belum mampu meredam meningkatnya jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Diperkirakan ada yang kurang tepat dalam perumusan dan implementasi kebijakan untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan penduduk miskin. Selama ini kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi karena dimensi inilah yang paling mudah diamati, diukur, dan diperbandingkan. Padahal kemiskinan berkaitan juga dengan berbagai dimensi antara lain dimensi sosial, budaya, sosial politik, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Menelaah kemiskinan secara multidimensional sangat diperlukan untuk perumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.¹

Indonesia merupakan negara yang belum mampu keluar dalam belenggu kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia meningkat dalam kurun waktu satu dekade. Implikasi dari masalah kemiskinan tidak hanya melibatkan aspek ekonomi pada masyarakat, namun juga melibatkan berbagai aspek kehidupan. Kemiskinan yang terjadi seringkali tidak disadari, bagi masyarakat golongan miskin kemiskinan merupakan suatu hal yang nyata adanya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan ketidak sadaran pada kondisi yang terjadi. Kemiskinan dinyatakan sebagai masalah multidimensi karena memiliki kaitan dengan adanya ketidakmampuan dalam hal akses ekonomi, sosial, budaya, politik, serta partisipasi di dalam masyarakat.²

Kemiskinan bukan sekedar perihal rendahnya pendapatan yang diperoleh atau rendahnya tingkat konsumsivitas masyarakat, tetapi kemiskinan bersangkutan dengan ketidakmampuan dalam mencapai aspek yang berada di luar pendapatan yang diperoleh seperti akses kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Setiap individu yang berkekurangan dalam hal materi dan sarana untuk menghidupi kebutuhannya termasuk dalam kategori miskin. Kemiskinan dapat berkembang atau bertransmisi dari generasi ke generasi yang dapat menyebabkan adanya konsekuensi-konsekuensi yang bersifat negatif seperti halnya kehidupan yang rumit dan kacau pada individu. Sebagai

¹Chriswardani Suryawati, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, *JMPK Vol. 08/No.03/September/2005*, Hlm 121-129

² Panjaitan, M. *Memberdayakan kaum miskin*. BPK Gunung Mulia. (2000).

konsekuensi dari cara pandang mengenai kemiskinan, kebijakan-kebijakan yang telah tersusun untuk menanggulangi kemiskinan dapat mencerminkan pola pikir masyarakat.

Masyarakat miskin merupakan obyek yang telah menjadi sasaran dalam menanggulangi kemiskinan. Golongan miskin dipandang sebagai orang yang tidak mampu dan tidak berdaya, lemah, serta apatis yang dikarenakan kemiskinan telah menjadi budaya bagi mereka. Golongan miskin juga dipandang tidak berdaya, lemah, serta apatis karena mereka terbelenggu oleh kendala struktural yang ada di masyarakat. Golongan miskin diposisikan sebagai subyek yang berpikir serta bertindak dalam hal mengembangkan strategi agar tetap bisa mempertahankan hidupnya. Dalam proses berpikir tersebut, golongan miskin sebagaimana halnya golongan yang tidak miskin mengembangkan hubungan sosial secara khusus di antara sesama golongan atau bahkan dengan golongan yang berbeda berdasarkan kompleksitas kepentingan masing-masing.³

Adanya asumsi mengenai hubungan-hubungan sosial yang terbangun antar golongan menimbulkan integrasi sosial, sehingga terjadi pembauran antar golongan. Sebagai konsekuensi dari hubungan sosial yang terbangun secara khas tersebut, maka akumulasi dari totalitas hubungan serta tindakan sosial yang terwujud memiliki dampak memundurkan kondisi kehidupan di perkotaan. Hal tersebut disebabkan karena hubungan-hubungan sosial yang bersifat non-formal semakin dianggap penting daripada aturan-aturan formal dalam menentukan arah tindakan. Keanggotaan dalam rumah tangga yang meningkat adalah indikasi dari masalah kemiskinan yang semakin berat, sehingga struktur rumah tangga harus selalu menyesuaikan atau disesuaikan agar dapat beradaptasi dan mampu merespon keadaan yang terjadi. Kemiskinan sebagai proses tidak membedakan golongan, hal tersebut karena adanya batasan yang tegas dengan satu sama lain yang melahirkan hubungan yang interaktif dengan sesama. Adanya konteks-konteks khusus yang dapat mengikat atau menghubungkan antar golongan, membangun kerjasama bersama, serta mewujudkan terbentuknya integrasi sosial di antara golongan miskin serta golongan yang tidak miskin di daerah perkotaan.⁴

DISKUSI

Sejak awal kehidupan manusia diciptakan oleh Sang Pencipta Yang Maha kuasa memiliki perbedaan. Sebagai bagian dari tidak tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

³ Bengkel Ginting, *Model Pemberdayaan Nelayan Tradisional : Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara*, Program Studi Doktor Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan 2017, Desertasi

⁴ Nurwati, N. Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, (2008), 10(1), 1.

manusia maka perbedaan adalah fakta bahwa yang dianugerahkan akan selalu melekat dan akan terus ada sepanjang sejarah kehidupan masyarakat pria. Bentuk perbedaan yang harus dihadapi oleh setiap individu manusia dalam kenyataan beragam secara sosial. Saat berinteraksi dengan individu lain, setiap individu dapat sehingga akan terjadi perbedaan pola perilaku, perspektif, standar hidup, hingga yang paling kompleks dan sistemik adalah perbedaannya budaya.

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang terdiri dari berbagai berbagai suku, ras, budaya tersebar di berbagai pulau di seluruh nusantara. Keanekaragaman suku dan budaya menjadikan suatu bangsa Indonesia kaya akan budaya membuat orang indonesia cenderung terbuka untuk imigran dan perubahan. Nilai perbedaan disertai dengan kemauan dan ketulusan sangat mendorong komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya yang berlangsung secara efektif dapat melahirkan suatu sikap menerima, mentolerir, dan menghormati budaya orang lain yang pada gilirannya mampu membangun hubungan yang harmonis antara orang-orang yang latar belakang budaya yang berbeda.⁵

Integrasi berdasarkan keinginan bersama dan memakan waktu yang cukup lama. peran komunikasi antarbudaya yang merupakan proses inklusif dapat menjadi pengikat dan menjembatani perbedaan seperti status sosial, suku, gender, dan agama dalam masyarakat yang juga bisa disebut multikultural untuk membentuk kepribadian yang cerdas, bijaksana dan sopan dalam berurusan dengan masalah keragaman. Integrasi sosial seperti yang dijelaskan oleh Ida Bagus Brata. Menurutnya, kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia merupakan aset kekayaan budaya masyarakat yang dapat dijadikan perekat sosial. Bahwa Indonesia yang beraneka ragam budaya dan agama tertanam nilai-nilai sosial yang mendorong manusia ke dalam ruang-ruang integrasi melalui jejaring sosial yang mereka bentuk. Putnam mengatakan bahwa keberadaan jaringan dalam kehidupan sosial akan meningkatkan efisiensi masyarakat karena memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi.⁶ Hubungan antaretnis melalui jaringan bersama dengan norma-norma yang disepakati merupakan sumber daya yang mengikat masyarakat luas. Interaksi yang terjadi secara terus menerus dalam masyarakat akan membentuk konvensi-konvensi yang ada untuk hidup rukun dan komitmen terhadap perlunya menjunjung tinggi norma-norma yang diterima. sepakat.⁷

⁵ Saifuddin, A. F. *Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan: Kajian Kasus di Jakarta. Antropologi Indonesia.* (2014)

⁶ Deddy Mulyanan & Jalaludin Rakhmat. *Komunikas Antar Budaya Panduan Berkomunikasi dengan Orang Orang Berbeda Budaya.* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2006), hal 12

⁷ Nurani Suyomukti. *Pengantar Ilmu Komunikasi.* Jogjakarta,AR Ruzz Media,2016, hlm 11

Masalah kemiskinan tidak ada habisnya bagi rakyat karena khususnya di Indonesia fenomena kemiskinan semakin meningkat diperluas dalam dekade terakhir. Berikutnya krisis moneter tahun 1997, Indonesia belum bisa keluar dari krisis ekonomi ini, dibandingkan dengan, misalnya, negara lain yang juga mengalami krisis parah sama seperti Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan. Tiga negara terakhir memiliki berhasil pulih, dan bahkan maju secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masalah kemiskinan juga sangat serius banyak orang, terutama oleh ilmuwan sosial. Sampai tahun 1980-an, menulis ilmu sosial ilmiah dengan dua cara berpikir dominan, yaitu: pertama, cara berpikir yang memandang kemiskinan sebagai fenomena mutlak; dan, kedua, cara berpikir yang melihat kemiskinan sebagai gejala relatif. Perspektif- Perspektif relativistik ini terdiri dari dua perspektif, yaitu sudut pandang (model) budaya, dan perspektif struktural (model). Kemudian, dimulai pada 1990-an, perkembangan baru dalam pendekatan untuk kemiskinan, yaitu memandang kemiskinan sebagai sebuah proses. Sudut pandang terakhir menguat dalam dua dekade terakhir, meskipun di Indonesia baru dikenal.

Melihat kemiskinan sebagai gejala relatif adalah kriteria arbitrer jadi itu mungkin sebenarnya dalam fraksi tertentu dari orang-orang yang dipilih rata-rata atau di bawah. Menggunakan model kemiskinan mutlak, lebih sedikit orang yang disertakan dalam kategori miskin dibandingkan jika menggunakan model kemiskinan relatif. Model kemiskinan relatif, meskipun menggambarkan lebih banyak realitas empiris yang penting untuk tujuan penelitian ilmiah sosial tetapi batasnya sering kabur untuk tujuan manufaktur aturan. Batas-batas kabur ini mencerminkan relativitas dinamis grup miskin seperti yang ditemukan dalam kenyataan empiris. Ada juga model yang menggambarkan batas-batas itu adalah mereka yang melihat kemiskinan sebagai budaya dan struktur sosial. Cara pandang budaya musyawarah budaya itu dapat memperkuat kemiskinan. Kemiskinan adalah cara hidup dikembangkan dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Sebagai cara hidup maka kemiskinan berkembang seperangkat mekanisme koping yang dapat konsekuensi negatif seperti kehidupan yang kacau, penjualan masa kecil dalam siklus kehidupan orang miskin, gejala kehidupan yang merajalela bersama tanpa menikah, gejala kejahatan merajalela kejahatan, banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Selanjutnya, orang miskin semakin jauh dari partisipasi dan integrasi ke dalam dalam masyarakat yang lebih luas. orang miskin dipandang sebagai unit sosial yang terpisah,

yang memiliki budaya yang disebut budaya kemiskinan yang khas khas, berbeda dengan masyarakat lain di luar.⁸

Sudut pandang struktural bahwa struktur sosial menstabilkan kemiskinan. Tekanan struktural seperti politik dan perekonomian mengakibatkan jumlah penduduk populasi didorong ke posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai bagian dari struktur, mereka tidak atau kurang mampu menangani struktur yang begitu kuat, sehingga tetap relatif lemah di posisi itu. Meskipun kedua model ini memiliki penekanan yang berbeda budaya dan Struktur sosial dalam tulisan ini ada dua analisis dimensi yang berbeda keduanya berada dalam ruang paradigma struktural-fungsionalisme yang sangat berpengaruh dalam ilmu-ilmu sosial, setidaknya sampai akhir 1970-an di negara maju, dan sampai sekarang di Indonesia. Kedua model ini melihat masyarakat (miskin) sebagai satu kesatuan budaya yang khas, tunggal, dan memiliki batas tegas berbeda).⁹

Pendekatan proses mengenai kemiskinan baru saja dikenal di Indonesia. Untuk sebagian besar, pendekatan yang digunakan di ruang ilmiah maupun praktis masih didominasi pendekatan kebudayaan dan struktural sebagaimana dibicarakan di atas. Kedudukan dan otoritas peneliti—dan pemerintah dalam konteks praktis—dominan dalam pendekatan kebudayaan (lihat Lewis 1961; 1966) dan struktural (lihat Valentine 1968) mengenai kemiskinan. Dengan kata lain, “orang miskin” dalam kedua model kemiskinan ini dilihat sebagai obyek, baik sebagai sasaran penelitian maupun sebagai sasaran program kebijakan. Dalam pendekatan proses, peneliti berupaya mengungkapkan kemiskinan menurut apa yang sesungguhnya terjadi dalam realitas empirik. Orang miskin diposisikan sebagai subyek yang berpikir dan bertindak, mengembangkan strategi-strategi dan kiat-kiat agar bertahan hidup. Mengikuti cara berfikir proses tersebut, maka masalah penelitian ini adalah bahwa orang miskin sebagaimana halnya orang yang tidak miskin mengembangkan hubungan-hubungan sosial khusus di antara sesama orang miskin maupun orang-orang yang tidak miskin berdasarkan kompleks kepentingan satu sama lain, yakni mempertahankan hidup (dalam hal ini berarti memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendasar). Penulis berasumsi bahwa: pertama, kompleks keterjalinan hubungan-hubungan sosial yang khas ini membangun suatu integrasi sosial orang-orang miskin dan tidak miskin sedemikian, sehingga batas-batas golongan miskin yang diasumsikan dalam pendekatan kebudayaan dan struktural di atas menjadi baur. Kedua, sebagai konsekuensi dari hubungan-hubungan sosial yang khas tersebut, maka akumulasi totalitas hubungan

⁸ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016

⁹ Suhardin, Y. Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), (2012), 302-317.

sosial dan tindakan sosial yang terwujud berimplikasi mundurnya kondisi kehidupan perkotaan, karena hubungan-hubungan sosial yang tidak formal semakin penting, dan bahkan kadang-kadang lebih penting daripada aturan-aturan formal dalam menentukan arah tindakan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan sandang dan pangan. Kemiskinan dapat terjadi pada seluruh masyarakat dan menjadi kaya merupakan harapan dari semua pihak. Perjuangan dalam menyamaratakan kedudukan untuk golongan miskin merupakan suatu hal yang dilakukan sebagai penghormatan terhadap martabat manusia. Menurut Franklin Delano Roosevelt, dunia di masa depan adalah dunia yang didasarkan pada kebebasan manusia. Terdapat empat belas kebebasan manusia menurut Franklin yang empat diantaranya yaitu kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat dimana pun dan kapan pun kebebasan dalam beribadah menurut kepercayaan yang dianut, serta bebas dari belenggu kemiskinan. Golongan miskin sulit menghadapi dan mengatasi kehidupannya sendiri, sehingga mereka membutuhkan bantuan dari orang lain.¹⁰

Dalam arti proper kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multi face atau multidimensional. Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan sendiri dibagi menjadi empat bentuk, yaitu :

- A. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

¹⁰ Marfuah, I. Kemiskinan Dan Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), (2007). 35-46.

- B. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- C. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- D. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Perkembangan terakhir, menurut Jarnasy kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (artificial).

- A. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- B. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu:

- 1) rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan,
 - 2) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah,
 - 3) kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja),
 - 4) kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area), dan
 - 5) kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup): bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.⁶
- Strategi untuk mengatasi kemiskinan tidak lepas dari strategi pembangunan yang dianut suatu negara. Program-program yang telah dilakukan untuk memerangi kemiskinan seringkali tidak memberikan hasil yang menggembirakan karena adanya perangkap kemiskinan (poverty trap) yang tidak berujung pangkal.

Terdapat beberapa penyebab kemiskinan menurut Nasikun, yaitu :

- a. Policy induces processes: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. Socio-economic dualism: negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. Population growth: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedang pertambahan pangan seperti deret hitung.
- d. Resources management and the environment: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. Natural cycles and processes: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. The marginalization of woman: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
- g. Cultural and ethnic factors: bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. Exploitative intermediation: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).
- i. Internal political fragmentation and civil stratife: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. International processes: bekerjanya sistem sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu:

1. Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.

2. Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
3. Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
4. Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
5. Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang, baik secara finansial maupun semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikategorikan miskin bilamana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimnya, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dimensi ekonomi dapat diukur dengan nilai rupiah meskipun harganya selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pada tingkat inflasi rupiah. Kemelaratan dan batas ini ditentukan oleh kebutuhan hidup yang minimal perlu dipenuhi bagi kehidupan yang sederhana.¹¹

Dimensi sosial politik dari kemiskinan lebih menekankan pada derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi penggunaan sumber daya. Kemiskinan politik merupakan gejala yang secara tidak langsung berpengaruh pada pengembangan kreativitas manusia dan masyarakat, yang pada gilirannya berpengaruh pada kualitas manusia. Kebijakan pemerintah dalam kerangka sosial politik disengaja atau tidak, sebagian di antaranya justru menyebabkan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pendapat para teoritis bahwa masyarakat atau negara miskin itu bukan karena mereka miskin (a country is a poor because it is poor), tetapi karena kebijakan pemerintah yang salah (a country is poor because of poor policies). Beberapa kebijakan ekonomi yang memberi andil menciptakan kemiskinan di Indonesia, antara lain: kebijakan penetapan harga dasar gabah yang rendah, pemberian subsidi impor beras dan bahan makanan lain, mengakibatkan gairah petani untuk menanam padi menjadi turun. Strategi industrialisasi yang tidak terarah dengan

¹¹ Zain, M. Reformasi Pengentasan Kemiskinan: Dari pendekatan ekonomi ke pendekatan kesejahteraan. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, FISIP-Universitas Air Langga*, 12, (2010). 79-96.

mengabaikan sektor pertanian atau kebijakan ekonomi yang tidak memperhatikan keterkaitan antara pertumbuhan sektor pertanian dan industri, pembangunan lebih berkonsentrasi pada perkotaan, subsidi modal untuk sektor modern dan pengusaha papan atas padahal sektor ini bukan tempat usaha orang miskin, dan lain-lain. Di sisi lain, banyak negara sedang berkembang menggunakan isu kemiskinan dan pengentasan kemiskinan sebagai kartu kemenangan pemilihan umum (pemilu), walaupun pada kenyataannya setelah menang, isu tersebut belum tentu diwujudkan dalam program kerjanya.

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian. Pendidikan nonformal perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Pendidikan informal dalam rangka pendidikan sosial dengan sasaran orang miskin selaku kepala keluarga (individu) dan anggota masyarakat tidak lepas dari konsep *learning society adult education experience learning* yang berupa pendidikan luar sekolah, kursus keterampilan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, penataran atau bimbingan, dan latihan. Pendidikan agama dan budi pekerti sangat penting untuk penanaman nilai-nilai agamawi dan budi pekerti terutama bagi anak-anak dan pemuda. Strategi pengentasan kemiskinan seharusnya tidak terpaku pada aspek ekonomi dan fisik saja, tetapi aspek nonfisik (rohaniah) juga perlu mendapatkan porsi yang cukup dalam kebijakan ini.¹²

Millenium Development Goals on Development and Eradication of Poverty in 2015 telah dideklarasikan oleh para pemimpin negara-negara di dunia pada tahun 2000. Para pemimpin dunia berjanji bekerja sama untuk mencapai target dalam pembangunan dan mengurangi kemiskinan di tahun 2015. Komitmen global tersebut mengamanatkan semua negara anggota PBB agar berusaha lebih keras untuk meningkatkan pendapatan yang selama ini tidak layak, kelaparan, ketimpangan gender, kerusakan lingkungan, hambatan

¹² Mahyuddin., Halim. *Modal Sosial Dan Integrasi Sosial : Asimilasi Dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 12 (2), (2019). 111-112.

untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan air bersih. Termasuk di dalam kesepakatan global tersebut adalah mengurangi beban hutang, meningkatkan bantuan, perdagangan, dan transfer teknologi kepada negara-negara miskin. Delapan tujuan dan 18 target telah dicanangkan dalam Kesepakatan Global Untuk Pembangunan dan Memerangi Kemiskinan. Delapan tujuan tersebut yaitu: 1) memerangi kemiskinan dan kelaparan (eradicate poverty and hunger), 2) mencapai pendidikan dasar bagi seluruh dunia (achieve universal primary education), 3) meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan (promote gender equality and empower women), 4) menurunkan angka kematian anak (reduce child mortality), 5) meningkatkan kesehatan ibu (improve maternal health), 6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya (combat HIV/AIDS, malaria and other diseases), 7) mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan (ensure environmental sustainability), 8) mengembangkan kemitraan dunia untuk pembangunan (develop a global partnership for development). Pada bulan Maret 2002 Deklarasi Johannesburg untuk pembangunan berkelanjutan dan Deklarasi Johannesburg untuk rencana implementasi berhasil menyusun kerangka kerja untuk meningkatkan kemitraan antara negaranegara kaya dan miskin. Memerangi kemiskinan seharusnya tidak bertentangan dengan upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia walaupun ancaman perang dan konflik, serta terorisme sedang berlangsung di berbagai kawasan dunia. Sebaliknya memerangi kemiskinan akan menyumbang terwujudnya perdamaian dunia. Direktur Millennium Project Jeffrey D. Sachs menyatakan dalam paparannya kepada peserta pertemuan regional tingkat menteri se-Asia Pasifik di Jakarta tanggal 4 Agustus 2005 yang membahas Millennium Development Goals (MDGs) bahwa perdamaian dunia tidak akan tercapai tanpa dibarengi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, harus ada gerakan internasional untuk memerangi kemiskinan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. “Tanpa global development, kita tidak mungkin mencapai global security, karena tidak ada perang terhadap teroris tanpa memerangi kemiskinan.

Kemiskinan dalam dimensi Kesehatan, banyak data dan hasil penelitian yang membuktikan bahwa kemiskinan sangat berhubungan dengan tingginya angka kesakitan dan kematian. Tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas kesejahteraan sosial akan mempersulit terpenuhinya berbagai keperluan pangan bergizi atau kemampuan untuk menangkis penyakit, sehingga tidak mengherankan apabila di lingkungan mereka tingkat kematian bayi tinggi. Berbagai macam penyakit mengancam mereka, seperti: malaria, tuberkulosis, penyakit mata,

kwasiorskor, dan lainnya sebagai akibat lemahnya daya resistensi. Hal ini menyebabkan usia harapan hidup mereka pendek dan tingkat kematian mereka tinggi.

Dalam hal kesehatan, ketika berhadapan dengan kemiskinan seperti yang terjadi pada masa krisis ekonomi, reaksi masyarakat bermacam-macam, seperti: orang miskin cenderung menghindari fasilitas rawat jalan, menunda pelayanan RS, menghindari penggunaan jasa spesialis yang mahal, cenderung memperpendek rawat inap, membeli separo atau bahkan sepertiga obat yang diresepkan sehingga tidak menjalani pengobatan total, mencari pengobatan lokal yang kadang-kadang dapat menimbulkan efek berbahaya, para ibu cenderung melahirkan di rumah dengan bantuan dukun yang memperbesar risiko persalinan, penyakit menjadi kronis karena menghindari pengobatan yang mahal. Pasien gagal ginjal cenderung menunda, membatalkan atau dibatalkan dari pengobatan, pasien cenderung mengobati sendiri yang berakibat terjadi komplikasi, tingkat pengguguran kandungan meningkat karena biaya dan implikasi sosial ekonomi, pasien menolak atau menunda prosedur operasi karena ketiadaan biaya.

Kemiskinan yang ditandai dengan pengangguran mempunyai banyak dimensi yang akan berkaitan dengan masalah kesehatan. Review terhadap beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Bartley menyimpulkan bahwa untuk memahami keterkaitan sosial, psikologi, dan biologi antara pengangguran dengan kesakitan dan kematian perlu ditelaah dengan empat mekanisme yaitu peran dari kemiskinan relatif, isolasi sosial, hilangnya rasa percaya diri, serta perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Keterkaitan kemiskinan dengan status gizi yang rendah dibuktikan oleh Gelberg yang meneliti 457 orang dewasa dari kelompok miskin yang tidak bertempat tinggal dan menunjukkan hasil sebanyak 33,3% mempunyai status gizi rendah (diukur dari berat, lingkar bahu atas, dan triceps skinfold). Status gizi rendah berkaitan dengan penggunaan obat yang lebih besar, tingginya subsidi pangan (gratis), pendapatan yang rendah, dan berjenis kelamin pria.

Mencoba menghitung jumlah penduduk miskin bukan pekerjaan mudah. Secara umum, saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hanya satu kalimat, tetapi maknanya sangat luas sehingga bisa mengundang perdebatan panjang. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kehidupan bermartabat. Apa pula yang termasuk hak-hak dasar? Apalagi, tidak semua hak dasar dapat atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik merupakan masalah multidimensi. Sulit mengukurnya sehingga perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai. Salah satu konsep perhitungan kemiskinan yang diterapkan di banyak Negara, termasuk Indonesia, adalah konsep kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar. Dengan konsep ini, penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.¹³

Dalam terapannya, dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran atau pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Perhitungan penduduk miskin ini didasarkan pada data sampel, bukan data sensus, sehingga hasilnya sebetulnya hanyalah estimasi. Data yang dihasilkan biasa disebut data kemiskinan makro. Di Indonesia, sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial ekonomi Nasional. BPS menyajikan data kemiskinan makro ini sejak tahun 1984 sehingga perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin bisa diikuti dalam waktu ke waktu. Salah satu data kemiskinan yang mengundang polemik panjang adalah data kemiskinan pada Maret 2006. BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin naik dari 35,1 juta jiwa (15,97 persen) pada Februari 2005 menjadi 39,30 juta jiwa (17,75 persen) pada Maret 2006 karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) (Kecuk Suharyanto, 2011). Adapun data kemiskinan makro yang terakhir dikeluarkan BPS adalah posisi Maret 2010 ketika jumlah penduduk miskin 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen total penduduk Indonesia. Data ini hanya menunjukkan estimasi jumlah dan persentase penduduk miskin yang berguna untuk perencanaan serta evaluasi program. Akan tetapi, data itu tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana alamat penduduk miskin sehingga tidak operasional untuk program penyaluran bantuan langsung, seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Kesejahteraan atau keadaan tidak miskin merupakan keinginan lahiriah setiap orang. Keadaan semacam itu, akan tetapi, barulah sekadar memenuhi kepuasan hidup manusia sebagai makhluk individu. Padahal, di samping sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakatnya. Dalam kapasitas sebagai makhluk sosial ini, manusia membutuhkan “kebersamaan” dengan manusia-manusia lain di dalam masyarakatnya. Kesetaraan kemakmuran dalam arti perbedaan yang ada tidak terlalu mencolok, merupakan salah satu sarana yang memungkinkan orang-orang bisa hidup bermasyarakat dengan baik dan tenang, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kemerataan sama pentingnya dengan kemakmuran. Pengurangan kesenjangan atau kesenjangan sama pentingnya dengan

¹³ Suryawati, C. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK*, (2005). 8 (3).

pengurangan kemiskinan.¹⁴ Ditilik berdasarkan berbagai indikator, terlihat masih berlangsungnya kesenjangan kesejahteraan antara orang-orang desa dengan orang-orang kota. Bahkan untuk beberapa variable atau indikator, sekalipun tingkat kesejahteraannya mengisyaratkan adanya perbaikan, perbedaan itu cukup mencolok. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melek huruf lebih besar di kota daripada di desa. Keadaan bayi dan anak-anak balita di kota lebih baik daripada teman-teman mereka yang tinggal di desa. Kelayakan rumah orang-orang kota jauh lebih baik daripada rumah orang-orang desa. Indeks mutu hidup di kota juga lebih baik daripada di desa. Semua ini cukup membutuhkan masih memprihatinkannya kesenjangan sosial anatar masyarakat desa dan masyarakat kota. Kesenjangan sosial pun bukan hanya berlangsung antardaerah, tetapi juga antar wilayah. Pengurangan kemiskinan memang perlu. Kemiskinan, sampai kadar tertentu, memang bertalian dengan ketimpangan. Akan tetapi pengurangan kemiskinan tidak selalu berarti pengurangan ketimpangan. Sebagai suatu bangsa, kita bukan hanya ingin hidup lebih makmur (tidak miskin), tetapi juga mendabakan kebersamaan dalam kemakmuran, kesejahteraan bersama yang relatif setara, tanpa perbedaan mencolok satu sama lain.

Pendekatan kualitatif terhadap kemiskinan di perkotaan diwarnai oleh cara pandang mikro yang menanggapi orang-orang miskin sebagai kelompok yang memiliki suatu kebudayaan yang distinktif, yang berbeda dari masyarakat yang lebih luas. Cara pandang ini sangat dipengaruhi oleh tradisi struktur dan fungsi dalam antropologi yang pada masa lampau lebih banyak memperhatikan masyarakat sederhana atau masyarakat pedesaan yang secara metodologi memenuhi persyaratan idiosinkratik tersebut. Oleh karena orang miskin dipandang memiliki kebudayaan yang khas, maka sebagai konsekuensi dari memandang kebudayaan sebagai pedoman hidup, maka kemiskinan mewujudkan suatu kebudayaan kemiskinan yang khas pula. Konsekuensi lain dari melihat suatu kelompok miskin sebagai penyandang suatu kebudayaan kemiskinan, maka kelompok ini dipandang minoritas dan terisolasi dan perlu dikembangkan program-program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Di Amerika Serikat, misalnya, dikenal program-program seperti Women and Infant Care (WIC), Food Stamp Program (FSP), dan lain-lain. Di satu sisi program-program ini meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin, tetapi di sisi lain justru memperkuat label orang miskin yang inferior karena mereka yang mendapat dan tidak mendapat bantuan program jelas terlihat. Strategi orang miskin dalam

¹⁴ Varanida, Dea. Komunikasi dalam Integrasi Sosial Budaya Antar Etnis Tionghoa dan Pribumi di Singkawang. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14 (1), (2016). 13-21.

menanggulangi kebutuhan hidup memperoleh perhatian dari para antropolog pada tahun 1970an hingga 1980an. Dapat dicatat beberapa kajian antara lain dari W.F. Whyte (1972), C. Stack (1974), U. Hannerz (1976), dan M. Williams (1980) yang memusatkan perhatian pada proses internal orang berkulit hitam Amerika Serikat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, namun kajian-kajian ini sangat kurang memperhatikan hubungan-hubungan sosial orang miskin tersebut dengan masyarakat yang tidak miskin di luar mereka. Orang berkulit hitam Amerika Serikat dilihat sebagai kelompok minoritas, memiliki latarbelakang sejarah perbudakan yang panjang, dan latarbelakang tersebut turut membentuk stereotip dan prasangka terhadap golongan miskin ini. Arus pemikiran baru dalam memandang kemiskinan mungkin dimulai secara bermakna melalui tulisan N.S. Hughes (1992) yang berpendapat bahwa orang miskin maupun orang yang tidak miskin memiliki kapasitas dan potensi untuk mengembangkan strategistrategi kreatif maupun manipulatif dalam menghadapi lingkungannya. Dengan menggunakan kasus kemiskinan di perkotaan Brasil, Hughes menunjukkan bahwa sukar membuat garis tegas batas-batas antara kedua golongan tersebut, terlebih populasi orang miskin di perkotaan Brasil sangat besar. Gambaran ini nampaknya mirip dengan yang terjadi di perkotaan Indonesia, khususnya Jakarta.

Golongan miskin yang tinggal di daerah perkotaan hidup pada tingkat subsistens serta di bawah subsistens. Maksud dari golongan miskin yang berada di daerah perkotaan merupakan mereka yang rendah dalam bidang pendidikan dan keterampilan atau bahkan tidak berpendidikan dan tidak memiliki bekal keterampilan sama sekali. Dalam karyanya, Oscar Lewis mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan kebudayaan. Kebudayaan kemiskinan menggambarkan rasa tidak adanya pengharapan dan usaha dari golongan miskin untuk masa depannya. Kebudayaan kemiskinan tersebut dapat terjadi pada golongan yang dalam kurun waktu yang lama hidup dengan serba kekurangan dan tidak kemampuan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Segala bentuk kegagalan yang dilalui membuat mereka putus asa dan pada akhirnya mereka menganut budaya kemiskinan tersebut. Kondisi seperti itu banyak dijumpai di daerah perkotaan.¹⁵

Dalam upaya menegakkan keadilan untuk menciptakan integrasi sosial di perkotaan masyarakat diharuskan untuk saling berhubungan. Pada realita yang terjadi, golongan miskin masih sering mendapat diskriminasi dari golongan lain. Hal-hal yang marak terjadi di perkotaan yang dianggap merugikan golongan miskin yaitu pasar-pasar kecil yang pada

¹⁵ Saifuddin, A. F. Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan : Kajian Kasus di Jakarta. *Antropologi Indonesia*, 29 (3). (2005).

awalnya sepi namun pada saat pasar tersebut sudah ramai, pasar-pasar tersebut akan diambil alih pemerintah daerah dan ditawarkan pada pengusaha besar untuk diubah menjadi pertokoan yang modern. Realita menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan, golongan miskin mudah tergusur dari daerah tempat mereka tinggal atau mendirikan usahanya. Sehingga permasalahan tersebut perlu diselesaikan agar tercipta keadilan sebagai bentuk integrasi sosial di masyarakat.

Kemiskinan di daerah perkotaan tidak dapat ditanggapi dengan konsep masyarakat dan kebudayaan yang sifatnya memandang orang miskin sebagai golongan yang dikhususkan dengan batasan-batasan yang tegas. Integrasi sosial dari golongan miskin terwujud karena adanya paradoks dari status sosial ekonomi yang mengakibatkan semakin sukarnya membangun program-program yang secara khusus dilakukan sebagai hal penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Golongan miskin dianggap perlu diberdayakan dan difasilitasi untuk menjalani roda kehidupannya. Dengan berpegang teguh pada keadilan sebagai hakikat dari negara hukum, moral dalam hal kemanusiaan dipatok sebagai harga yang nilainya paling tinggi yang harus dicapai. Untuk terciptanya keadilan dan integrasi sosial antar golongan masyarakat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut *pro poor* yang mencakup:

1. Kebijakan redistributif
2. Kebijakan tindakan afirmatif untuk menangani ketidaksetaraan sosial
3. Penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan bagi keluarga yang memiliki penghasilan rendah
4. Aksesibilitas pada kredit mikro yang terjangkau
5. Perencanaan dan anggaran partisipasi yang berbasis luas dan difasilitasi
6. Anggaran berbasis kinerja yang berangkat dari program-program yang memiliki kegiatan serta indikator-indikator dan ukuran hasil yang teridentifikasi dengan jelas

Integrasi sosial tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada hubungan yang dimiliki oleh antar golongan. Integrasi sosial akan terwujud apabila antar golongan saling menjalin hubungan, menjalin kerjasama yang adil, dan sama sama menjunjung rasa kemanusiaan.

PENUTUP

Implikasi dari masalah kemiskinan tidak hanya melibatkan aspek ekonomi pada masyarakat, namun juga melibatkan berbagai aspek kehidupan. Kemiskinan dapat berkembang atau bertransmisi dari generasi ke generasi yang dapat menyebabkan adanya konsekuensi-konsekuensi yang bersifat negatif seperti halnya kehidupan yang rumit dan

kacau pada individu. Golongan miskin dipandang tidak berdaya, lemah, serta apatis karena mereka terbelenggu oleh kendala struktural yang ada di masyarakat. Adanya asumsi mengenai hubungan-hubungan sosial yang terbangun antar golongan menimbulkan integrasi sosial, sehingga terjadi pembauran antar golongan. Sebagai konsekuensi dari hubungan sosial yang terbangun secara khas tersebut, maka akumulasi dari totalitas hubungan serta tindakan sosial yang terwujud memiliki dampak memundurkan kondisi kehidupan di perkotaan. Oleh karena itu, integrasi sosial akan terwujud apabila masing-masing golongan sama-sama menjunjung keadilan dan kemanusiaan.

Golongan miskin dipandang sebagai orang yang tidak mampu dan tidak berdaya, lemah, serta apatis yang dikarenakan kemiskinan telah menjadi budaya bagi mereka. Kemiskinan yang terjadi seringkali tidak disadari, bagi masyarakat golongan miskin kemiskinan merupakan suatu hal yang nyata adanya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan ketidak sadaran pada kondisi yang terjadi. Kemiskinan bukan sekedar perihal rendahnya pendapatan yang diperoleh atau rendahnya tingkat konsumsivitas masyarakat, tetapi kemiskinan bersangkutan dengan ketidakmampuan dalam mencapai aspek yang berada di luar pendapatan yang diperoleh seperti akses kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

Kemiskinan dapat berkembang atau bertransmisi dari generasi ke generasi yang dapat menyebabkan adanya konsekuensi-konsekuensi yang bersifat negatif seperti halnya kehidupan yang rumit dan kacau pada individu. Golongan miskin dipandang sebagai orang yang tidak mampu dan tidak berdaya, lemah, serta apatis yang dikarenakan kemiskinan telah menjadi budaya bagi mereka. Dalam proses berpikir tersebut, golongan miskin sebagaimana halnya golongan yang tidak miskin mengembangkan hubungan sosial secara khusus di antara sesama golongan atau bahkan dengan golongan yang berbeda berdasarkan kompleksitas kepentingan masing-masing.

Keanggotaan dalam perumahan tangga yang meningkat adalah indikasi dari masalah kemiskinan yang semakin berat, sehingga struktur rumah tangga harus selalu menyesuaikan atau disesuaikan agar dapat beradaptasi dan mampu merespon keadaan yang terjadi. Kemiskinan sebagai proses tidak membedakan golongan, hal tersebut karena adanya batasan yang tegas dengan satu sama lain yang melahirkan hubungan yang interaktif dengan sesama. Adanya konteks-konteks khusus yang dapat mengikat atau menghubungkan antar golongan, membangun kerjasama bersama, serta mewujudkan terbentuknya integrasi sosial di antara golongan miskin serta golongan yang tidak miskin di daerah perkotaan.

Komunikasi antar budaya yang berlangsung secara efektif dapat melahirkan suatu sikap menerima, mentolerir, dan menghormati budaya orang lain yang pada gilirannya mampu membangun hubungan yang harmonis antara orang-orang yang latar belakang budaya yang berbeda. Peran komunikasi antarbudaya yang merupakan proses inklusif dapat menjadi pengikat dan menjembatani perbedaan seperti status sosial, suku, gender, dan agama dalam masyarakat yang juga bisa disebut multikultural untuk membentuk kepribadian yang cerdas, bijaksana dan sopan dalam berurusan dengan masalah keragaman. Bahwa Indonesia yang beraneka ragam budaya dan agama tertanam nilai-nilai sosial yang mendorong manusia ke dalam ruang-ruang integrasi melalui jejaring sosial yang mereka bentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Panjaitan, M. (2000). *Memberdayakan kaum miskin*. BPK Gunung Mulia.
- Nurwati, N. (2008) *Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan*. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1.
- Saifuddin, A. F. (2014) *Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan: Kajian Kasus di Jakarta*. *Antropologi Indonesia*.
- Suhardin, Y. (2012). *Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 302-317.
- Marfiah, I. (2007). *Kemiskinan Dan Kesejahteraan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 35-46.
- Zain, M. (2010). *Reformasi Pengentasan Kemiskinan: Dari pendekatan ekonomi ke pendekatan kesejahteraan*. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, FISIP-Universitas Air Langga*, 12, 79-96.
- Saifuddin, A. F. (2005). *Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan : Kajian Kasus di Jakarta*. *Antropologi Indonesia*, 29 (3).
- Mahyuddin., Halim. (2019). *Modal Sosial Dan Integrasi Sosial : Asimilasi Dan Akulturasi Budaya Masyarakat Multikultural Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. *Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 12 (2) , 111-112.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. *JMPK*, 8 (3).
- Syawie, M. (2011). *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial*. *Informasi*, 16 (3).
- Varanida, Dea. (2016). *Komunikasi dalam Integrasi Sosial Budaya Antar Etnis Tionghoa dan Pribumi di Singkawang*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14 (1), 13-21.